

**PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI
KELOMPOK EKONOMI KEWIRAUSAHAAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus : Desa Nyatnyono Ungaran Barat)**

Nurmiyati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Email : zeus.ramses@yahoo.com

Idul Hanzah Alid

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Email : idoel@undaris.ac.id

Abstrak

BUMDes memberikan peran besar dalam peningkatan masyarakat desa, apabila pengelolaan potensi desa dilakukan secara professional dan dikelola oleh orang-orang yang tepat dalam bidangnya dengan melibatkan kelompok-kelompok ekonomi kewirausahaan yang ada di desa. Jika BUMDes berhasil dalam mengelola operasionalnya, maka hasil tersebut tidak hanya dapat menguntungkan desa itu sendiri melainkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan BUMDes juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi melalui program-program yang ditetapkan bersama antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data dan metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (Focus Group Discussion). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

Hasil penelitian yang paling utama adalah merubah mindset sebagian masyarakat tentang potensi desa tidak boleh dikuasai hanya oleh sekelompok masyarakat atau golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat desa melalui kelompok ekonomi kewirausahaan yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keywords : Bumdes, Pemberdayaan Kewirausahaan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

UU 6/2014 tentang Desa mengamankan bahwa desa dapat membentuk/ mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), ini berarti bahwa desa tidak harus/ wajib membentuk/ mendirikan BUM Desa. Namun mengingat pentingnya lembaga ini dalam upaya membantu pemerintah desa memenuhi kebutuhan dasar warga serta dalam rangka memajukan dan

mendinamisir ekonomi desa maka saat ini banyak desa mendirikan BUM Desa. Melalui BUM Desa upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga serta kegiatan ekonomi produktif desa dapat dikelola lebih profesional dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Melalui BUM Desa, potensi desa dan kebutuhan warga dapat dipertemukan dalam unit usaha-unit usaha yang diselenggarakan bahkan depan BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi di pedesaan. BUMDesa beberapa desa diharapkan mampu berperan sebagai instrumen sosial yang dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal serta kepedulian sosial terhadap warga yang kurang beruntung. BUMDesa didesain sebagai lembaga sosial bisnis, sehingga dalam kegiatannya tidak melulu berorientasi pada keuntungan keuangan (profit oriented) tetapi juga berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa

Dengan hadirnya BUMDes diharapkan pemberdayaan ekonomi yang berfokus kepada potensi desa yang ada, dengan melibatkan seluruh masyarakat desa melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi kewirausahaan yang ada di masyarakat berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian desa. Hal ini sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengolah potensi desa menjadi penghasilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sehingga lembaga yang berbasis pedesaan ini berfokus pada hal komersial dan juga manfaat sosial di masyarakat.

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa,
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa,
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Sebagai lembaga komersial BUMDes harus bisa mengolah potensi desa yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan pedesaan, sehingga dapat menciptakan daya alam yang belum dikelola. Selain itu, dapat memperbaiki fasilitas penunjang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan BUMDes tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti Desa Nyatnyono yang memiliki BUMDes “Sejahtera Bersama” diharapkan memberikan peran besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memiliki potensi desa wisata religi yang sudah diakui oleh khayak umum. Apabila pengelolaan BUMDes dilakukan orang yang tepat dan manajemen yang professional, tidak mustahil kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat melalui kegiatan kelompok ekonomi kewirausahaan yang berkaitan dengan kebutuhan para peziarah selama mereka berada di desa Nyatnyono. Dengan demikian, apabila BUMDes berhasil dalam mengelola operasionalnya, maka hasil tersebut tidak hanya dapat menguntungkan desa itu sendiri melainkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk memberdayakan BUMDes melalui kelompok ekonomi kewirausahaan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengubah mindset dan pola pikir sebagian masyarakat tentang kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki desa?
2. Bagaimana cara mengenali potensi desa Nyatnyono sebagai desa wisata religi yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan desa?
3. Bagaimana cara memperoleh ilmu tentang kewirausahaan?
4. Bagaimana cara memotivasi masyarakat agar menjalankan usaha secara serius?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah dengan Pemberdayaan BUMDes Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan yang di harapkan adalah tersusunnya sebuah program perencanaan dan pelaksanaan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stake holder didesa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Berdasarkan Permendes PDTT nomor 4 tahun 2015 pasal 3 BUMDes didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mendukung berjalannya tujuan pendirian dan pengelolaan BUMDes, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang BUMDes, diantaranya sebagai berikut :

1. UU nomor 23 tahun 2014 yakni: “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 sampai dengan 81 .
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
5. Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut kurang lebih diatur dengan cukup jelas terkait dengan pendirian BUMDes, pengelolaan, permodalan, dan manfaat BUMDes yang diperuntukkan sepenuhnya bagi masyarakat desa. Meskipun berbentuk badan usaha namun BUMDes memiliki perbedaan dengan badan usaha pada umumnya

Dalam Buku Panduan Pendirian Pengelolaan BUMDes (2007) dijelaskan bahwa terdapat sedikitnya tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan jenis usaha yang lainnya, yaitu :

1. BUMDes bukan milik perseorangan atau individu, namun badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

2. Modal usaha bersumber dari desa sebesar 51% dan sisanya bersumber dari masyarakat dan atau dukungan dari sponsor melalui sistem penyertaan modal.
3. Memperhatikan budaya lokal.
4. BUMDes menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa.
5. Keuntungan sepenuhnya diperuntukkan untuk pengelola dan masyarakat desa
6. Difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa.
7. Pengawasan dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Pemberdayaan Kewirausahaan

Moeljanto dalam Wahono et al. (2001), pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata “empowerment” , yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (selfreliant communities), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people-centered development) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community-based resources management), yang merupakan mekanisme perencanaan people-centered development yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (social learning) dan strategi perumusan program.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment). Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya. Sehingga pemberdayaan (Empowerment) merupakan central theme. atau jiwa partisipatif yang sifatnya aktif dan kreatif (Moeljanto dalam Setyoko, 2002). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai

suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Sementara istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “Entrepreneurship” yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “perantara”. Wirausaha sendiri berasal dari Bahasa Perancis, entrepreneur yang dalam Bahasa Inggris berarti go between yang berarti “antara” (Alma, 2005). Menurut Suryana (2001) kewirausahaan adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif (menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda) yang dijadikan dasar, sumber daya, kiat dan proses menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian mengambil resiko.

As'ad (2003) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan dan sikap mandiri, kreatif, inovatif, ulet, berpandangan jauh ke depan, pengambilan resiko yang sedang dan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain dalam bidangnya atau masyarakat. Menurut Suharto (2005) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), terutama kebebasan dalam mengemukakan pendapat, (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) Berpartisipasi

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas social dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indicator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (*focus Group Discussion*). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

Dalam penelitian ini, sebagai narasumber adalah Bapak Mu'alim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nyatnyono.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Nyatnyono merupakan wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang mempunyai luas 425 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lerep. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gogik. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Wilayah Kabupaten Temanggung. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Genuk. Kondisi geografis Desa Nyatnyono mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut ± 700 M dengan keadaan topografi tinggi dan suhu udara rata-rata 18°C . Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan ± 4 km. Jarak dengan Ibukota kabupaten Semarang ± 3 km, jarak dari Ibukota propinsi ± 23 km dan jarak dari Ibu Kota Negara ± 603 km Data Monografi Desa Nyatnyono, 2006. Potensi desa Nyatnyono masih sangat besar, mengingat desa ini memiliki makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan khalayak pada umumnya yaitu makam Waliyullah Hasan Munadi dan Sendang keramat Kalimah Toyyibah sebagai destinasi wisata religi yang sudah dikenal hingga sampai ke luar Propinsi Jawa Tengah.

Sebagai pilar kegiatan BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial bagi masyarakat desa, sudah seharusnya BUMDes “Sejahtera Bersama” di Desa Nyatnyono sebagai wadah yang menaungi kelompok ekonomi kewirausahaan yang dikelola secara professional sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal yang bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan didalam menentukan usaha dan bebas mengemukakan pendapat

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang ada di desa Nyatnyono sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan dengan mudah untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Dapat berpartisipasi aktif dalam rangka membangun ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan usaha yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Nyatnyono.

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Nyatnyono bahwa secara umum belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berdasarkandari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Nyatnyono Bapak Mu'alim yang mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh masih adanya pemikiran atau mindset sebagian masyarakat yang merasa sebagai keturunan dari kyai atau tokoh agama yang mengurus makam Waliyullah Hasan Munadi, sehingga mereka mendominasi usaha di desa Nyatnyono. Peranan pemerintah desa disini sangat diperlukan untuk merubah mindset masyarakat bahwa sumber daya alam yang dimiliki desa tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu tetapi dikembalikan kepada desa dan dilakukan pengelolaan bersama-sama dengan seluruh masyarakat melalui BUMDes yang sudah ada.

Mengetahui *potensi ekonomi desa* menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Sekitar kurang lebih sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah gencar menggenjot ekonomi daerah, melalui beberapa program yang ditujukan ke desa-desa. Pemerintah desa harus mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kepala dusun mengenai potensi yang dimiliki Desa Nyatnyono yang dikenal sebagai desa wisata religi dan sudah dikenal oleh khalayak umum untuk membentuk kelompok-kelompok ekonomi kewirausahaan yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para peziarah yang berasal dari wilayah Jawa Tengah maupun peziarah yang berasal dari luar Jawa Tengah selama melakukan ziarah ke makam Waliyulloh Hasan Munadi. Misalnya kelompok usaha homestay atau penginapan, kelompok usaha kuliner dan oleh-oleh khas desa Nyatnyono, kelompok usaha angkutan untuk mengangkut peziarah dari terminal menuju makam dan sendang Kalimah Toyyibah dan lain sebagainya.

Ilmu kewirausahaan sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi desa yang sangat besar, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana harus memulai suatu usaha, bagaimana pengelolaan manajemennya dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Kurangnya informasi akan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui bahwa masih banyak potensi desa yang bisa dikembangkan berkaitan dengan adanya wisata religi di Desa Nyatnyono. Pemerintah desa tidak boleh hanya dapat memberikan informasi terkait strategi usaha secara teoritis saja dan mengabaikan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah desa bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait, lembaga pendidikan formal maupun non formal yang berkompeten di bidangnya untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat melalui kelompok ekonomi kewirausahaan yang sudah dibentuk.

Motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia. Tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang dimiliki tidak mampu untuk merubah menjadi kemampuan yang maha dahsyat. Motivasi usaha merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang. Kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasinya yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalaninya. Motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk serius dalam menjalankan usahanya harus selalu diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok ekonomi kewirausahaan agar selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, misalnya dengan mengadakan pelatihan dengan menghadirkan motivator atau pengusaha yang sudah sukses dari luar daerah sehingga kelompok ekonomi kewirausahaan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bisa diterapkan untuk usaha yang sedang dijalankan. Pemerintah desa harus sering turun langsung mendatangi kegiatan kelompok ekonomi kewirausahaan yang ada di masyarakat dengan melihat kondisi riil kegiatan usahanya sehingga tidak ada kelompok usaha tetapi tidak ada kegiatan usaha atau kelompok usaha fiktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (empowerment) Seharusnya pemerintah desa mengundang masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mengelola potensi desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha dan pelatihan tentang kewirausahaan bagi anggota dari masing-masing kelompok usaha sehingga masyarakat

dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif, ulet berpandangan jauh ke depan dan menyadari potensi desa yang ada bukanlah milik perseorangan atau kelompok tertentu, tetapi milik seluruh masyarakat yang dikelola secara bersama-sama melalui kelompok-kelompok ekonomi kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Pendirian Pengelolaan BUMDes

Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Boston, MA: Pearson.

Mustanir, Ahmad. (2017). *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif*. STISIP Muhammadiyah Rappang Sidenreng , Indonesia.

Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif Empowerment of Badan Usaha Milik Desa Through Participatory Entrepreneurship Economic Groups

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.